Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
E-ISSN: 3032-3606
Vol. 3, No. 2, Juli 2026. Pp. 69–74
DOI: https://doi.org/10.70308/mcyy8x78

PENGUATAN PERAN DAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN REPRESENTASI PUBLIK

STRENGTHENING THE ROLE AND CAPACITY OF DPRD MEMBERS IN PERFORMING LEGISLATIVE, BUDGETING, AND PUBLIC REPRESENTATION FUNCTIONS

[1]Muhammad Ali Basroh*
[2]Mukhlis Yunus
[1]Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Merangin, Jambi
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merangin, Jambi
Email Correspondence: alibasrohm@gmail.com
*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:
DPRD; penguatan kapasitas; legislasi; anggaran; representasi publik

Keywords:
DPRD; capacity building; legislation; budgeting; public representation

Abstrak: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap regulasi, kebijakan daerah, penganggaran, serta kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Kegiatan dilaksanakan pada 14–17 Mei 2026 di Luminor Hotel Jambi dengan melibatkan 45 anggota DPRD Provinsi Jambi. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus yang berkaitan dengan tugas DPRD. Materi kegiatan mencakup pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran daerah, serta penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang baik dan aktif dalam mengikuti diskusi serta pembahasan studi kasus. Peserta juga mampu menghubungkan materi dengan tugas dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi DPRD. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat mendukung penguatan pemahaman dan kapasitas anggota DPRD. Penguatan kapasitas secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Abstract: Members of the Regional House of Representatives (DPRD) play an important role in regional governance through their legislative, budgeting, and public representation functions. Carrying out these functions requires an adequate understanding of regulations, regional policies, budgeting, and community needs. This community service activity aimed to strengthen the roles and capacities of members of the Jambi Provincial DPRD in performing their legislative, budgeting, and public representation functions. The activity was conducted from May 14 to 17, 2026, at Luminor Hotel Jambi, involving 45 members of the Jambi Provincial DPRD. The activity employed an educational and participatory approach through presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and case studies related to the duties and functions of the DPRD. The topics covered the formulation of Regional Regulations (Perda), regional budgeting, and the collection and management of community aspirations. The results showed that participants responded positively and actively engaged in discussions and case studies. Participants were also able to relate the materials to their duties and the challenges encountered in carrying out their functions. These results indicate that an educational and participatory approach can support the improvement of DPRD members' understanding and capacity. Continuous capacity building is needed to support more effective and responsive legislative, budgeting, and public representation functions in accordance with community needs.

*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan menentukan arah kebijakan daerah. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pembentukan peraturan daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan sebagai fungsi DPRD provinsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat (Republik Indonesia, 2014). Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang baik tentang regulasi, kebijakan publik, dan penganggaran daerah. Anggota DPRD juga perlu mampu menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara tepat. Kemampuan tersebut penting agar kebijakan daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan responsif.

Penguatan kapasitas anggota DPRD diperlukan agar mampu menghadapi persoalan pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Saleh et al. (2021) menguraikan peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah, termasuk melalui pemeriksaan lapangan dan penelaahan pertanggungjawaban anggaran. Peningkatan kapasitas tidak hanya melalui pengetahuan, tetapi juga latihan untuk menerapkannya dalam tugas. Hafizi et al. (2022) menekankan bahwa pelatihan perlu disusun sesuai kebutuhan dan dievaluasi hasilnya. Karena itu, penguatan kapasitas DPRD perlu dilakukan secara praktis dan sesuai dengan tugas yang dijalankan.

Dalam fungsi legislasi, anggota DPRD perlu mampu memahami persoalan masyarakat, mengkaji rancangan Perda, dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sudarsono et al. (2022) menyebutkan bahwa fungsi legislasi DPRD perlu diperkuat agar Perda yang dihasilkan lebih responsif. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022). Wardana et al. (2023) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih sesuai dengan kebutuhan publik. Karena itu, kemampuan analisis kebijakan dan penyerapan aspirasi menjadi penting bagi anggota DPRD.

Fungsi anggaran berkaitan langsung dengan penentuan prioritas pembangunan dan penggunaan keuangan daerah. Anggota DPRD perlu memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencermati program prioritas, serta menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Haliza et al. (2023) menunjukkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan proses penganggaran daerah. Simangunsong dan Irham (2022) menyoroti pentingnya kapasitas dan integritas anggota DPRD dalam pengawasan APBD. Karena itu, pemahaman dan kemampuan menganalisis anggaran perlu diperkuat agar fungsi anggaran dapat dijalankan dengan lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Representasi publik menjadi bagian penting dari tugas anggota DPRD sebagai wakil masyarakat. Anggota DPRD perlu mampu mendengar dan memahami aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikannya dalam proses kebijakan daerah. Wardana et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat penting untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Karena itu, kemampuan komunikasi dan pengelolaan aspirasi perlu diperkuat agar masukan

masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Hafizi et al. (2022) menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan Kim dan Lee (2023) menunjukkan bahwa pelatihan akan lebih bermanfaat apabila pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan. Karena itu, kegiatan penguatan kapasitas dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi yang berkaitan dengan tugas anggota DPRD.

Provinsi Jambi memiliki kebutuhan pembangunan dan persoalan masyarakat yang beragam sehingga diperlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Anggota DPRD Provinsi Jambi berperan dalam pembentukan Perda, penganggaran, pengawasan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Atas dasar itu, PKM "Penguatan Peran dan Kapasitas Anggota DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Representasi Publik di Provinsi Jambi" diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD melalui edukasi, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Materi kegiatan mencakup analisis kebijakan, pembentukan Perda, APBD, serta pengelolaan aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 14–17 Mei 2026 di Luminor Hotel Jambi. Peserta kegiatan merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Pendekatan ini digunakan agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga dapat membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan peran sebagai anggota DPRD.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan materi, koordinasi dengan pihak terkait dan narasumber, serta penyiapan kebutuhan kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai fungsi legislasi, penganggaran daerah, serta representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Tahap evaluasi dilakukan dengan melihat keaktifan peserta selama kegiatan, tanggapan terhadap materi, serta hasil evaluasi yang diberikan setelah kegiatan. Dokumentasi berupa foto dan catatan kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan PKM.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Anggota DPRD Provinsi Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penguatan Peran dan Kapasitas Anggota DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Representasi Publik" dilaksanakan pada tanggal 14–17 Mei 2026 di Luminor Hotel Jambi. Kegiatan diikuti oleh 45 anggota DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pelaksanaan tugas DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), pembahasan dan pengawasan anggaran daerah, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan didokumentasikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Anggota DPRD



Sumber: *Dokumentasi kegiatan penguatan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jambi, 2026.*

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Materi disampaikan dengan menghubungkan konsep, regulasi, dan pelaksanaan tugas anggota DPRD. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Pendekatan ini membuat kegiatan berlangsung secara interaktif dan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan serta pengalaman yang berkaitan dengan tugasnya.

Pada pembahasan fungsi legislasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pembentukan Perda, mulai dari identifikasi permasalahan, penyusunan rancangan, pembahasan, hingga pentingnya partisipasi masyarakat. Pembahasan diarahkan pada bagaimana anggota DPRD dapat berperan dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peserta juga diajak membahas berbagai persoalan yang dapat muncul dalam proses pembentukan kebijakan serta pentingnya memahami substansi regulasi sebelum memberikan masukan atau keputusan.

Pembahasan fungsi anggaran diarahkan pada pemahaman mengenai peran DPRD dalam pembahasan APBD dan penentuan prioritas pembangunan daerah. Peserta membahas pentingnya mencermati kesesuaian antara program, alokasi anggaran, dan kebutuhan masyarakat. Melalui studi kasus, peserta dapat menghubungkan materi dengan persoalan penganggaran yang berkaitan dengan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat di daerah.

Selain legislasi dan anggaran, kegiatan juga membahas fungsi representasi publik. Anggota DPRD sebagai wakil masyarakat perlu mampu menerima, memahami, dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses kebijakan daerah. Pembahasan diarahkan pada bagaimana aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran. Kemampuan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi secara baik.

Respons dan Manfaat Kegiatan bagi Anggota DPRD

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan respons yang baik melalui keaktifan dalam diskusi, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus. Peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang berkaitan dengan pembentukan Perda, penganggaran daerah, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa materi kegiatan relevan dengan tugas anggota DPRD dan dapat dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keterkaitan antara fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik. Peserta tidak hanya membahas aspek regulasi dan kebijakan, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Hal ini terlihat dari pembahasan studi kasus serta pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan selama kegiatan. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan dapat dipahami dan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas anggota DPRD.

Kegiatan juga menjadi ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan pandangan mengenai pelaksanaan tugas DPRD. Berbagai persoalan yang dibahas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik membutuhkan pemahaman terhadap regulasi sekaligus kemampuan menganalisis persoalan yang berkembang di masyarakat. Diskusi dan studi kasus membantu peserta melihat hubungan antara kebijakan daerah, penganggaran, dan kebutuhan masyarakat secara lebih nyata.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya. Materi yang diberikan melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus membantu peserta menghubungkan pengetahuan dengan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Penguatan kapasitas perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anggota DPRD semakin mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik secara efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Peran dan Kapasitas Anggota DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Representasi Publik” berhasil dilaksanakan dengan melibatkan anggota DPRD Provinsi Jambi. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran daerah, dan representasi publik. Keaktifan peserta selama diskusi dan pembahasan kasus menunjukkan bahwa materi yang diberikan relevan dengan tugas dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Kegiatan ini memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman dan kemampuan peserta untuk menghubungkan regulasi, kebijakan, penganggaran, dan aspirasi masyarakat dengan pelaksanaan tugas DPRD. Untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan, diperlukan tindak lanjut melalui pelatihan, diskusi, dan penguatan kapasitas secara berkala sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dan perkembangan kebijakan daerah. Kerja sama antara perguruan tinggi, DPRD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan representasi publik yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hafizi, Wasliman, I., Hanafiah, & Fatkhullah, F. K. (2022). Management of teacher competency development and training in improving learning quality. *Journal of Education Research and Evaluation, 6*(3), 520–528. https://doi.org/10.23887/jere.v6i3.52673

Haliza, N. A., Fendri, A., Andora, H., Khairani, & Rosari, A. (2023). Penganggaran dana pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(1), 141–151. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11091

Kim, M. Y., & Lee, H. J. (2023). Finding triggers for training transfer: Evidence from the National Human Resource Development Institute in Korea. *Public Money & Management, 43*(8), 825–832. https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2209904

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022

Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, & Sarkawi. (2021). Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), 7*(1), 14–20. https://doi.org/10.29303/jseh.v7i1.97

Simangunsong, N. A., & Irham, M. (2022). Analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(4), 1269–1284. https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13807

Sudarsono, Riban Satia, M., & Yusuf, M. (2022). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (kajian di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). *Pencerah Publik, 9*(2), 40–49. https://doi.org/10.33084/pencerah.v9i2.4256

Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum, 30*(1), 66–77. https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813